



Pusat Analisis Keparlemenan  
Badan Keahlian Setjen DPR RI

## DILEMA PROGRAM PEREMAJAAN SAWIT RAKYAT

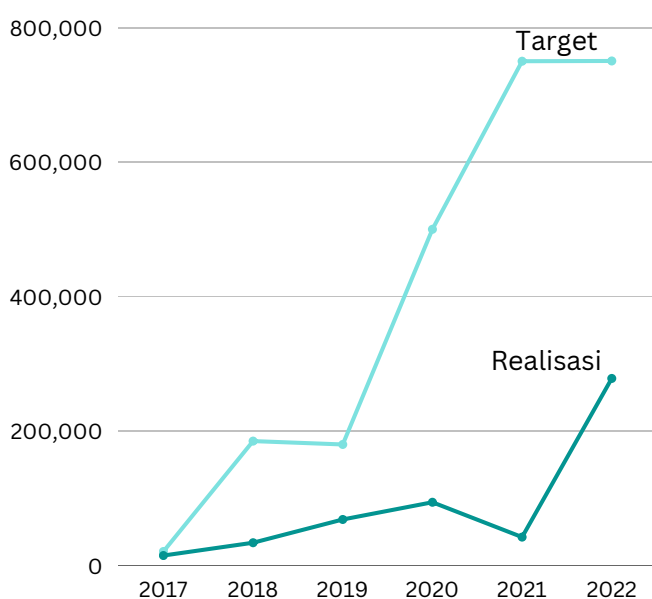
**Sri Nurhayati Qodriyatun**

Analisis Legislatif Ahli Madya  
[sri.qodriyatun@dpr.go.id](mailto:sri.qodriyatun@dpr.go.id)

### Isu dan Permasalahan

Kondisi perkebunan kelapa sawit rakyat dalam keadaan tidak baik-baik saja. Dengan luas kebun sawit rakyat mencapai 6,02 juta ha pada tahun 2021, produktivitasnya hanya mencapai 15,5 juta ton CPO per tahun. Berbeda sekali dengan perkebunan besar swasta yang menguasai 8,04 juta ha, produktivitas bisa mencapai 27,4 juta ton CPO per tahun. Rendahnya pencapaian tersebut bisa mengancam masa depan sawit nasional jika semua pihak tidak melakukan langkah komprehensif. Salah satu upaya untuk meningkatkan produktivitas kebun sawit rakyat adalah melalui program peremajaan sawit rakyat (PSR). Program ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani sawit rakyat melalui penggantian tanaman sawit yang sudah tua dengan bibit yang lebih produktif dan tahan terhadap penyakit. Program ini juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi kelapa sawit serta mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.

Pemerintah, melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), telah menggelontorkan dana hingga Rp7,5 triliun sepanjang 2016–2022 untuk program PSR tersebut. Bahkan, pemerintah menargetkan program PSR dapat mencapai 540 ribu ha dalam kurun waktu 2017–2023 dengan target per tahun 180 ribu ha. Namun, Kementerian Pertanian (Kementan) mencatat realisasi PSR hingga akhir tahun 2022 baru mencapai 278,2 ribu ha. Rendahnya realisasi program PSR dikarenakan, antara lain, masih ditemukannya fragmentasi birokrasi (penyebaran tanggung jawab dalam kegiatan PSR yang membutuhkan adanya koordinasi), rendahnya minat masyarakat terhadap peremajaan sawit rakyat, sulitnya mendapatkan lahan yang cukup untuk ditanami bibit unggul karena faktor legalitas lahan (lahan kebun sawit rakyat banyak yang berada di kawasan hutan), lemahnya kelembagaan pekebun dalam pengelolaan kegiatan, dan kurangnya dukungan kalangan swasta.



**Gambar 1.** Realisasi Program Peremajaan Sawit Rakyat dalam Hektar (BPDPKS, 2023)

Upaya yang dilakukan pemerintah hingga saat ini dalam mengatasi berbagai kendala tersebut, antara lain, dengan (a) melaksanakan program kemitraan dengan perusahaan sawit untuk peremajaan sawit rakyat guna memastikan kualitas sawit rakyat sama dengan kebun perusahaan mitranya dan mempermudah pencairan dana Rp30 juta per hektar dari BPDPKS, (b) menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit yang memungkinkan diusulkannya PSR oleh perusahaan –yang merupakan

mitra kelembagaan pekebun- tanpa rekomendasi teknis Direktur Jenderal Perkebunan Kementan, (c) pencabutan larangan ekspor minyak sawit mentah (CPO) dan produk turunan serta penghapusan pungutan ekspor agar pabrik-pabrik pengolah bisa menyerap lebih banyak tandan buah segar (TBS) sawit petani, (d) membentuk Gugus Tugas Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun. Berbagai upaya tersebut diharapkan dapat membantu mengurai permasalahan serta kendala di berbagai daerah, baik dalam pengusulan maupun pelaksanaan program PSR. Apalagi, di tahun ini program PSR bakal menysasar 200.000 ha kebun sawit rakyat, dengan 80.000 ha-100.000 ha lahan berasal dari kemitraan jalur plasma dan 180.000 ha dari pekebun swadaya.

Berbagai upaya tersebut belum menyentuh secara keseluruhan permasalahan sebenarnya yang menghambat pelaksanaan program PSR. Masih perlu upaya lain untuk mengatasinya. *Pertama*, memberikan penyuluhan dan pendidikan untuk para petani sawit rakyat tentang praktik peremajaan kebun sawit yang baik sehingga mereka dapat melakukan budidaya kelapa sawit yang berkelanjutan. *Kedua*, memfasilitasi akses petani sawit rakyat terhadap lahan dengan melakukan pemetaan lahan yang tersedia dan mengalokasikan lahan yang belum dimanfaatkan untuk program PSR. Pemerintah juga dapat memberikan bantuan dalam penyelesaian konflik lahan antara petani sawit rakyat dengan pihak lain. *Ketiga*, meningkatkan dukungan dari pihak swasta dengan memberikan insentif bagi perusahaan kelapa sawit dan bank yang memberikan dukungan dalam pelaksanaan program PSR. Pemerintah dapat juga memfasilitasi pertemuan antarpetani sawit rakyat dengan pihak swasta untuk membahas kerja sama yang saling menguntungkan.

## Atensi DPR

Sawit masih menjadi komoditas unggulan yang menjanjikan untuk menambah devisa negara. Tidak hanya itu, industri sawit juga memberikan kontribusi dalam menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia. Menjaga keberlanjutan kebun sawit rakyat melalui program PSR perlu dukungan DPR, khususnya Komisi IV. Melalui pelaksanaan fungsi pengawasan, Komisi IV dapat mendorong pemerintah untuk terus melakukan berbagai upaya akselerasi program PSR, antara lain, dengan terus memberikan penyuluhan kepada petani sawit rakyat, memfasilitasi akses petani atas lahan, memberikan bantuan dalam penyelesaian konflik lahan, dan melibatkan pihak swasta dalam program PSR tersebut. Harapannya, produktivitas sawit rakyat dan kesejahteraan petani sawit rakyat meningkat.

## Sumber

antaranews.com, 16 Mei 2023;  
bisnis.com, 16 Mei 2023;  
*Bisnis Indonesia*, 16 & 17 Mei 2023;  
kompas.com, 16 Mei 2023;  
*Media Indonesia*, 20 Mei 2023; dan  
republika.co.id, 16 Mei 2023.



Koordinator Sali Susiana  
Polhukam Puteri Hikmawati  
Ekkuinbang Sony Hendra P.  
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>

@anlegbkdoofficial

**Polhukam**  
Simela Victor M.  
Prayudi  
Novianto M. Hantoro

EDITOR

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.  
Sita Hidriyah  
Noverdi Puja S.

©PuslitBK2023

**Ekkuinbang**  
Sri Nurhayati Q.  
Sulasi Rongiyati  
Rafika Sari  
Eka Budiyanti  
Dewi Wuryandani

**Kesra**  
Yulia Indahri  
Trias Palupi K.  
Luthvi Febryka Nola

Mohammad Teja  
Nur Sholikhah P.S.  
Fieka Nurul A.